

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dan menjalankan seluruh kehidupannya sebagai individu dalam kelompok sosial, komunitas, organisasi, maupun masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia berinteraksi dengan individu lain yakni dengan berkomunikasi, dimana komunikasi tersebut merupakan penghubung terjalinnya suatu ikatan antar manusia satu dengan yang lainnya.

Komunikasi dalam konteks kesehatan merupakan suatu proses penyampaian pesan kesehatan oleh komunikator melalui saluran/media tertentu pada komunikan dengan tujuan yang mengarah kepada keadaan sehat masyarakat, baik secara fisik mental maupun sosial. Saat ini program kesehatan masyarakat makin gencar dilakukan, mengingat tingkat kesehatan masyarakat menunjang keberhasilan pembangunan Nasional. Salah satu program kesehatan masyarakat yang ada saat ini yakni Program Keluarga Berencana (KB) yang telah dirintis sejak tahun 1972.

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk mengurangi kecepatan pertumbuhan penduduk dan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak khususnya dan keluarga pada umumnya. Hal ini dapat dilakukan bagi pasangan suami istri dengan membatasi jumlah kelahiran anak yang diinginkan (Hartanto, 2004:26).

Berbicara KB tentunya tidak terlepas dari kontrasepsi sebagai alat atau sarana dalam membatasi jumlah kelahiran anak. Adapun kontrasepsi yang ada saat ini dibagi menjadi dua macam metode yaitu (1) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang terdiri dari IUD (*Intra Uterine Device*/spiral), MOP (Medis Operasi Pria/vasektomi), MOW (Medis Operasi Wanita/tubektomi), implan, dan (2) Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) yang terdiri dari, pil, suntik, dan kondom.

Saat ini perkembangan Program Keluarga Berencana (KB) rupanya dinilai mengalami kemunduran. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan penduduk setelah zaman orde baru. Berdasarkan data media online Tempo.com menyebutkan, saat ini jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,3% atau 3 juta orang setiap tahunnya. Hal ini disebabkan tingkat kelahiran per ibu sebanyak 2,4 , artinya setiap perempuan memiliki 2-3 anak dan diprediksikan hingga 15 tahun kedepan, Indonesia mempunyai penduduk dengan umur produktif sangat besar.

Disamping itu, persentase peserta KB baru terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) juga mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 16,51% menjadi 13,46% di tahun 2015 (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam mewujudkan keluarga berkualitas tahun 2015 belum terealisasi.

Sehubungan dengan itu, pada awal tahun 2016, Presiden RI Ir. Joko Widodo menginisiasi terbentuknya Kampung Keluarga Berencana (KB) dengan tujuan untuk membumikan kembali program KB kepada masyarakat yang berawal dari tingkat desa atau kampung, sehingga kesejahteraan penduduk di kemudian hari menjadi terealisasi (BKKBN, 2016),

Kampung Keluarga Berencana (KB) yang berada dibawah naungan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ini sudah tersebar di 33 Provinsi di Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Jawa Timur. Sebagai contoh dalam program kampung KB, setiap kabupaten memiliki satu kampung KB. Untuk wilayah Kabupaten Bangkalan kampung KB resmi dicanangkan tepatnya didusun Sembilangan barat, Desa Sembilangan, Kecamatan Bangkalan pada tanggal 15 Maret 2016.

Jumlah Pasangan Usia Subur di kampung ini sebanyak 103 pasangan. Diantaranya 58 orang merupakan peserta KB aktif. Dari ke 58 orang tersebut, 1 peserta KB IUD, 3 peserta KB implan, 0 (tidak ada) peserta MOW/MOP, 38 peserta KB suntik, 15 peserta KB pil dan 0/tidak ada untuk peserta kondom (Unit Pelaksanaan Teknis Kecamatan Bangkalan, 2016).

Kampung Keluarga Berencana (KB) merupakan program miniature pemerintah yang dengan adanya kampung KB tersebut diharapkan dapat dijadikan wadah dalam menghidupkan kembali program KB khususnya, melalui tingkat kampung atau setara. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Disinilah peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sangat dibutuhkan, mengingat bahwa tidak ada jalan lain mensukseskan kesehatan masyarakat kecuali memanfaatkan jasa komunikasi (Liliweri, 2011:29).

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, penggerakan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan program keluarga berencana. Dimana PLKB merupakan komunikator dilapangan yang terdepan sekaligus memiliki peran penting sebagai fasilitator, disminator dan motivator dalam menggerakkan masyarakat yang memiliki latar belakang sosial yang berbeda baik pendidikan, budaya maupun agama.

Para ahli kesehatan ataupun ahli ilmu sosial menyadari bahwa masalah kesehatan dan masalah penyakit yang dialami manusia tidak hanya bersumber dari kesalahan individu, tapi bisa juga disebabkan oleh kesalahan masyarakat, keluarga, ataupun kelompok. Berbagai masalah tersebut pada umumnya disebabkan karena ketidaktahuan dan kesalahpahaman atas berbagai informasi kesehatan. Oleh karena itu Informasi kesehatan khususnya KB perlu didukung dengan komunikasi yang tepat

Keberhasian sebuah pesan untuk dapat diterima oleh komunikan dengan mudah dan cermat adalah kemmapuan kapasitas komunikator dalam menyampaikan informasi. Kapasitas komunikator akan mempengaruhi penyampaian pesan dapat berhasil sesuai harapan, maka pilihan metode dan saluran komunikasi menjadi sangat penting dalam hal ini. Sensifitas informasi juga sangat mempengaruhi bentuk-bentuk komunikasi apa yang tepat digunakan agar informasi tersampaikan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengamati/meneliti komunikasi kesehatan seperti apa yang digunakan/diterapkan Petugas KB dalam proses penyebaran informasi kesehatan khususnya KB pada masyarakat Kampung KB di Bangkalan dalam mewujudkan keluarga berkualitas tingkat kampung. Karena pelaksanaan program KB tidak akan berhasil tanpa keberadaan petugas KB dilapangan.

Alasan peneliti memilih lokasi Bangkalan dikarenakan berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu dari ketiga Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang pencapaian program Keluarga Berencana (KB) masih rendah yaitu dibawah target Nasional 65% dengan peserta KB pil sebesar 28,8%, peserta KB suntik sebesar 59,1%, peserta KB implan sebesar 7,4%, peserta KB IUD sebesar 1,3%, peserta KB MOW sebesar 1,8%, peserta KB MOP sebesar 0,2% dan kondom sebesar 1,4% dari 166.003 pasangan usia subur (PUS).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “ Bagaimana komunikasi kesehatan PLKB dalam Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) pada Kampung Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi kesehatan yang diterapkan/digunakan Petugas Keluarga Berencana (PLKB) sebagai komunikator utama di lapangan dalam menyampaikan informasi kesehatan masyarakat terkait Program Keluarga Berencana pada Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini tidak hanya memiliki manfaat bagi penulis saja, tetapi diharapkan juga bermanfaat bagi pihak-pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain dalam rangka pengembangan bidang ilmu komunikasi lebih lanjut.
2. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan bagi ilmu komunikasi khususnya yang berkaitan dengan komunikasi kesehatan dalam sosialisasi Program Keluarga Berencana.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat berguna bagi pihak BKKBN provinsi Jawa Timur, BPPKB kabupaten Bangkalan selaku leading sektor dalam program kampung KB, Petugas Keluarga Berencana (KB) tingkat kecamatan sebagai penyuluh kesehatan, maupun komunikator kesehatan lainnya dalam mengembangkan komunikasi kesehatan yang efektif sehingga dapat dijadikan contoh bagi kampung KB selanjutnya di Kabupaten Bangkalan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat berguna bagi masyarakat Bangkalan khususnya masyarakat yang ada di Kampung KB Bangkalan.
3. Bagi peneliti, penelitian ini untuk menambah wawasan, pengetahuan serta pengalaman penelitian ilmu dan strategi komunikasi dibidang komunikasi kesehatan dalam lembaga pemerintahan seperti BKKBN.